

## **BAB II**

### **RADIKALISME POLITIK PROGRESIF, TEKNOLOGI DIGITAL, DAN PARTISIPASI POLITIK KAUM MUDA**

Bab ini menyajikan latar belakang sejarah radikalisme politik progresif dan keterlibatan kaum muda, serta peran dari teknologi digital dalam partisipasi politik kaum muda.

#### **2.1. Sejarah Radikalisme Politik Progresif**

Radikalisme baik sebagai filosofi/pemikiran dan fenomena politik telah ada jauh sejak awal mula zaman modern. Dari sisi filosofis, terdapat kaitan antara pembentukan pemikiran politik radikal modern dan Pencerahan (*Enlightenment*) yang dikenal di Eropa (McLaughlin, 2012, hal. 30, 49-50). Penggunaan kata “radikalisme” untuk menjelaskan kepercayaan dan praktik politik telah menjadi umum pada awal abad ke-19 dan seterusnya. Kaum “radikal” merujuk pada para pendukung reformasi sosial dan politik yang *radikal* (McLaughlin, 2012, hal. 13). Pada konteks Eropa abad itu, kaum radikal adalah orang-orang yang tercerahkan, memiliki prinsip politik yang liberal sampai sayap kiri, dan menentang kemapanan politik reaksioner. Doktrin radikalisme menginspirasi gerakan nasional dan republikan yang berkomitmen memperjuangkan emansipasi dan kebebasan kolektif yang menentang kekuasaan aristokratis dan monarkis (Bötticher, 2017, hal. 74).

Gerakan politik radikal progresif adalah gerakan yang beragam disebabkan oleh adanya keberagaman pemikiran politik radikal. Seperti didiskusikan oleh Mc Laughlin (2012), pemikiran-pemikiran tersebut membentuk suatu tradisi (pemikiran) radikal yang mendiskusikan sampai tingkatan tertentu masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat secara mendasar/fundamental (hal. 37-39, 41, 45). Dalam kaitannya dengan modernitas, radikalisme modern adalah ‘respons kritis terhadap bangkitnya negara, kapitalisme, dan relasi-relasi sosial baru’ dan sekaligus merupakan produk budaya dari reformasi, revolusi, dan pencerahan (hal. 50). Progres (kemajuan) didefinisikan sebagai perubahan kepada kondisi yang lebih baik (*change for the better*). Mereka yang berpandangan progresif menerima bahwa perubahan semacam itu adalah mungkin, khususnya dalam lingkup sosial-politik (hal. 201).

Radikalisme modern awal tampak dalam karya Étienne de La Boétie berjudul *Discourse of Voluntary Servitude* (Diskursus tentang Perhambaan Sukarela) yang menginvestigasi kemungkinan yang sangat untuk munculnya tirani, khususnya yang didasari oleh persetujuan/*consent*, dan bagaimana harapan sosial (*social hope*) muncul dalam minoritas di antara orang-orang yang diperbudak ‘yang dapat menentang kekuatan norma, menegaskan hak alamiah mereka untuk bebas, dan mungkin pula mendidik massa dengan cara yang sesuai’ (McLaughlin, 2012, hal. 51, 55). Pada masa Pencerahan abad ke-18, sebuah karya penting dalam pemikiran politik radikal adalah *Discourse on Inequality* (Diskusi tentang Ketidaksetaraan) atau *Second Discourse* oleh Jean-Jacques Rousseau yang

membahas masalah distribusi kekuasaan sosial sebagai landasan timbulnya ketidaksetaraan sosial yang meliputi ketidaksetaraan ekonomi, politik, dan bentuk ‘non-alamiah’ lainnya di antara manusia (McLaughlin, 2012, hal. 56-57).

Terjadinya peristiwa Revolusi Perancis menciptakan perubahan perhatian para radikal dari hal-hal yang relatif abstrak kepada hal-hal yang relatif konkrit terkait kondisi sosial *dunia nyata* (McLaughlin, 2012, hal. 69-70). Karya yang hadir setelah Revolusi Amerika dan pada konteks Revolusi Perancis, *Enquiry Concerning Political Justice* (Penyelidikan Mengenai Keadilan Politik) oleh William Godwin dapat dikatakan sebuah karya terakhir dari tradisi pra-revolusioner. Ia berpandangan bahwa tatanan sosial yang sah adalah tatanan yang tidak ada segala bentuk pemaksaan secara hukum (*legal coercion*) dan tidak ada ketidaksetaraan ekonomi, atau dengan kata lain ketiadaan pemerintah yang mengatur kehidupan individu-individu sehingga setiap orang dapat mengatur dirinya sendiri (*self-legislating*) dan otonom (McLaughlin, 2012, hal. 63, 67-70).

Di antara teoritis radikal pasca-revolusioner, terdapat Charles Fourier yang dalam karyanya *The Theory of the Four Movements* (Teori Empat Gerakan) mendiskusikan kondisi sosial berupa kemiskinan yang ditimbulkan oleh kapitalisme komersial dan menawarkan visi rekonstruktif atau ‘utopian’ mengenai masyarakat masa depan (McLaughlin, 2012, hal. 70, 74). Ide proto-sosialis dari Fourier diambil oleh Pierre-Joseph Proudhon dalam karyanya *What is Property?* (Apakah itu properti?) dan memperkenalkan kembali topik ketidaksetaraan sosial dari tradisi pemikiran Rousseau. Proudhon ingin menjawab/menyelesaikan

masalah sosial yang dibahas Fourier tidak dengan ‘organisasi yang lebih baik atas tenaga kerja’ melainkan terutama pada penghapusan properti privat—serta ketidaksetaraan sosial dan penindasan politik—melalui revolusi kepada tatanan anarkisme mutualis (McLaughlin, 2012, hal. 76-77, 79-80).

Dalam periode abad ke-19, terdapat dua macam radikalisme yang cukup berpengaruh: radikalisme Marxian dan radikalisme anarkis. Karya Karl Marx dan Friedrich Engels berjudul *Manifesto Komunis* (atau Manifesto Partai Komunis) membahas empat topik/bab yang dua di antaranya, yaitu: (1) teori dasar komunisme berupa penerapan analisis kelas dan konsepsi materialis atas sejarah serta (2) karakteristik dari komunisme dan program-program untuk perubahan sosial-politik. Bagi Marx dan Engels, *kelas* adalah obyek mendasar dari teori sosial. Keduanya tidak sekedar berbicara terkait relasi-relasi dari kelas-kelas sosial melainkan juga asal-usul pembagian kelas, konflik sosial yang timbul darinya, dan persoalan kekuasaan politik. *Proletariat*—kelas buruh/pekerja upahan yang tidak memiliki sarana produksinya sendiri—memiliki peran revolusioner dalam sejarah (sebagaimana borjuasi dalam perubahan sosial dari feodalisme ke kapitalisme) untuk mewujudkan komunisme dengan: *pertama*, revolusi politik proletarian (merebut kekuasaan negara), sentralisasi sarana produksi kepada properti/kepemilikan publik, penghapusan antagonisme/pertentangan kelas—yang tercermin dalam relasi-relasi sosial (lihat Kollontai, 2006; İşikara, 2018; Moufawad-Paul, 2019)—, dan *terakhir*,

penghapusan kekuasaan politik/negara yang menyisakan organisasi sosial administratif (McLaughlin, 2012, hal. 81-82; 84-88; 90).

Dalam tradisi anarkis, pamflet karya Mikhail Bakunin berjudul *Tuhan dan Negara* adalah yang paling berpengaruh pada masanya. Pamflet tersebut mendiskusikan topik-topik meliputi hubungan antara agama dan politik serta antara anarkisme dan Marxisme. Bakunin memandang otoritas keagamaan dan otoritas politik negara ditopang oleh kepercayaan religius atau idealisme. Kepercayaan/idealisme ini berfungsi menjadi ‘obat pereda’ bagi kaum tertindas dan ‘segel pengaman’ bagi kaum penindas. Maka, akar dari ketidakadilan umat manusia adalah persoalan ideologis yang memiliki landasan materiil. Asal usulnya (idealisme) adalah pengabaian/ketidakpedulian atas perkembangan materiil dan ilmiah serta hasrat kebebasan yang tidak terpenuhi. Baginya, negara mencerminkan perwujudan kekerasan yang dimitoskan oleh idealisme baik yang timbul dari agama maupun filsafat—termasuk Hegelianisme (dalam kritik terhadap negara Jerman) dan Marxisme (dalam kritik terhadap kemungkinan negara proletar/buruh). Karenanya, revolusi sosial anarkis (tanpa negara) adalah jalan satu-satunya merealisasikan potensi kebebasan umat manusia (McLaughlin, 2012, hal. 90-95).

Pada periode abad ke-20, terdapat radikalisme anti-kolonial yang memiliki fokus perhatian pada kolonialisme dan dekolonialisasi. Frantz Fanon dalam buku *The Wretched of the Earth* (Kaum Sengsara di Bumi, atau “Bumi Berantakan”) mendiskusikan secara khusus dimensi sosial dan psikologisnya. Buku ini ditulis

pada masa gelombang dekolonisasi Afrika. Menurutnya, kolonialisme hadir dan dipertahankan melalui sarana pemaksaan/kekerasan (*force*). Negeri jajahan terkotak-kotak berdasarkan konfigurasi sosial, rasial dan geografis serta secara moral dan kultural di mana kaum terjajah dipandang kurang manusia (*dehumanize*) daripada kaum penjajah. Bagi Fanon, dekolonisasi adalah penggantian/substitusi dari ‘spesies’ manusia (penjajah) dengan yang lain: orang luar diganti dengan orang asli atau, dalam konteks Afrika, orang putih dengan orang hitam. Dengan kata lain, dekolonisasi adalah pengembalian kembali ‘kepercayaan diri’ atau kemanusiaan kaum terjajah. Nasionalisme kaum terjajah pada akhirnya harus menjadi ‘humanisme’ baru, yaitu (1) penciptaan manusia dengan cara berpikir baru, (2) ‘sosialisme’ atau ekonomi yang memanusiakan, (3) desentralisasi dan pemerataan, serta (4) demokrasi untuk seluruh korban kolonialisme, ditambah (5) keadilan penebusan/retributif melalui pemulihan/reparasi ekonomi oleh kekuatan kolonial lama (McLaughlin, 2012, hal. 110-116).

Pada pertengahan akhir abad ke-20, seperti halnya Fanon yang memperluas lingkup bahasan filsafat politik kepada masyarakat tertentu berdasarkan ras, sebuah radikalisme ekologis berkembang yang memperluas bahasan kepada hubungan masyarakat dan alam / aspek non-manusia). Murray Bookchin dalam teks *Ecology and Revolutionary Thought* (Ekologi dan Pemikiran Revolusioner) membahas kemungkinan perubahan sosial-politik di zaman krisis ekologis dan hubungan tidak terpisahkan antara masalah sosial dan ekologi.

Menurutnya, solusi untuk krisis ekologis dan masalah sosial adalah penciptaan komunitas-komunitas yang berjalan secara demokratis, mandiri (*self-sufficient*), dan ter-desentralisasi di mana individu-individu dapat mewujudkan potensi mereka melalui praktik-praktik sosial, intelektual, dan politik yang diragamkan (*diversified*). Keberagaman adalah kunci dalam memahami ekologi karena ‘harmoni dan stabilitas tercapai, tidak dengan simplifikasi lingkungan fisik dan kultural, melainkan dengan ‘diferensiasi organik’. Hubungan antara ekologi dan anarkisme terletak pada penerimaan bahwa ‘diferensiasi adalah alat ukur kemajuan’ dan ‘penekanan yang kuat pada spontanitas’ (McLaughlin, 2012, hal. 116-117, 119-121).

Sejauh ini radikalisme yang disebutkan banyak berbicara tentang para laki-laki, tetapi radikalisme bukanlah fenomena laki-laki saja karena tradisi feminis sebetulnya sama tuanya dengan tradisi lain yang telah disebutkan (lihat “History of feminism”, n.d.). Dalam tradisi radikalisme (politik) feminis (untuk dibedakan dari feminisme radikal), salah satu karya representatif adalah *The Sexual Contract* oleh Carole Pateman yang menginvestigasi bentuk patriarkal dari kekuasaan politik modern yang berlandaskan gagasan tentang kontrak sosial. Pateman menemukan bahwa, di balik kontrak sosial eksplisit yang melegislasi kebebasan sipil, terdapat kontrak seksual implisit yang menjadi sarana dominasi laki-laki, yaitu ‘hak patriarkal’ atau ‘hak-seks’ laki-laki. Laki-laki dapat menggunakan hak eksklusif ini untuk mengatur—atau, hak politis atas—perempuan dan mendapat

akses yang ditertibkan (kontrol domestik) atas tubuh perempuan (McLaughlin, 2012, hal. 127-129).

Kontrak sosial itu tidaklah *sosial* karena didasarkan pada eksklusi (tidak melibatkan) yang lain. Eksklusi ini, sekalipun utamanya dalam patriarki menarget perempuan, tidak terbatas pada perempuan atau berdasarkan seks, tetapi juga kelas sosial dan ras. Pateman menggarisbawahi bahwa mereka yang masuk dalam kontrak (sosial) asali itu adalah ‘pria *putih*’. Orang-orang (termasuk laki-laki) hitam dan diperbudak adalah kelompok sosial yang dieksklusi dan merupakan bukti bahwa kontrak asali itu, tidak seperti yang dikira, sangatlah eksklusif dan menindas (McLaughlin, 2012, hal. 129-130).

## **2.2. Gerakan Politik Radikal dan Keterlibatan Kaum Muda**

Secara tradisional gerakan politik radikal diasosiasikan dengan orang-orang dewasa dan para filosof tua, tetapi khususnya sejak abad ke-20 kaum muda semakin menunjukkan perannya dalam gerakan politik radikal. Dalam sejarah perjuangan anti-kolonial di Hindia Belanda atau Indonesia (dan Papua Barat), pengaruh radikalisme politik progresif sangat kuat khususnya di antara kaum muda. Peristiwa terkenal pemberontakan komunis tahun 1926-1927 menandakan tradisi politik radikal yang telah berkembang di Indonesia sejak masa kolonial.

Asal usul pemberontakan tersebut dapat ditelusuri dari berdirinya Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada tahun 1914 oleh para sosialis Belanda, seperti Henk Sneevliet, di Indonesia. Keanggotaan awal ISDV adalah



terutama orang-orang Belanda dan untuk dapat menggerakkan kaum bumiputra, ISDV membangun aliansi dengan perhimpunan populer yang telah ada, khususnya Sarekat Islam (SI), dan serikat-serikat buruh. Pendidikan anti-kapitalisme dan perlawanan dari ISDV mengubah SI menjadi semakin radikal (Subijanto, 2020). Pemikiran politik radikal dapat diterima di dalam tubuh SI disebabkan pendidikan di SI sendiri sudah mengenal tokoh-tokoh seperti Marx, Engels, Proudhon, Bakunin, dan lain-lain. Semakin populernya gagasan sosialisme/komunisme di SI menciptakan perpecahan di mana kelompok yang radikal kemudian tersatukan dalam perserikatan yang dikenal sebagai SI Merah. SI Merah berganti nama menjadi Sarekat Rakyat pada tahun 1924 (Putra, 2023).

Namun, “komunisme/sosialisme” pada masa itu dipahami secara berbeda. Istilah itu dapat digunakan untuk menyebut perjuangan apapun yang anti-kolonial. Seperti didiskusikan oleh Putra (2023), meskipun secara resmi ISDV atau PKI (Partai Komunis Indonesia) memeluk komunisme Marxian, terdapat gagasan non-Marxis seperti anarkisme dan sindikalisme yang menjadi anasir dalam gerakan “komunisme” Indonesia. Gagasan non-Marxis justru lebih populer dengan mudah ditemukannya karya-karya tokoh anarkis dan sindikalis. Pada saat itu, karya-karya Karl Marx banyak yang masih berbahasa Inggris dan Belanda. *Manifesto Komunis*, misalnya, baru diterjemahkan pada tahun 1924. Selain terjemahan karya-karya tokoh radikal, gagasan-gagasan radikal yang anti-kolonial dan anti-kapitalis juga menyebarluas melalui terbitan pers. Irfansyah & Puspitasari (2014),

dalam tulisan mengenai pers *kiri* era pergerakan, menyebutkan sejumlah koran yang terbit khususnya di Jawa, antara lain:

- *Doenia Bergerak*, tahun terbit 1914, pemimpin redaksi Marco;
- *Medan Moeslimin*, tahun terbit 1915, pemimpin redaksi HM Misbach;
- *Sinar Djawa*, tahun terbit 1914 (redaksi kiri sejak 1917), pemimpin redaksi Semaoen;
- *Sinar Hindia*;
- *Ra'jat Bergerak*, tahun terbit 1923, pemimpin redaksi HM Misbach;
- *Berani*, tahun terbit 1925, pemimpin redaksi Boullie, terbit di Borneo Barat;
- *Njala*, tahun terbit 1925, pemimpin redaksi Semaoen;
- *Pemberita*, tahun terbit 1926, pemimpin redaksi Sarpinoedin;
- dan koran-koran lainnya.

Pada masa perjuangan anti-kolonial, keterlibatan kaum muda dalam gerakan politik radikal progresif tampak dalam tokoh-tokoh seperti Semaoen, Aliarcham, dan Tan Malaka. Ketiga tokoh tersebut merupakan ketua umum ISDV atau PKI secara bergantian dari tahun 1920 s.d. 1922. Semaoen adalah seorang propagandis serikat buruh kereta api atau trem (VSTP), pengurus di Sarekat Islam dan ISDV, dan redaktur di sebuah surat kabar VSTP. Ia mengambil alih redaksi *Sinar Djawa* pada tahun 1917 dan dipuji karena kualitas terbitan yang semakin baik (Irfansyah & Puspitasari, 2014). Semaoen berperan penting dalam mengorganisir pemogokan dan aksi langsung di antara para buruh. Di bawah

kepemimpinannya, keanggotaan SI Semarang mengalami peningkatan dari 1.700 menjadi 20.000 orang pada tahun 1916 (Putra, 2018, hal. 71).

Aliarcham bergerak dalam bidang pendidikan sesuai dengan latar belakangnya sebagai pengajar. Usulan penggantian nama SI Merah menjadi Sarekat Rakyat datang dari Aliarcham dan ia pernah menjabat menjadi ketuanya pada tahun 1923. Seperti halnya tokoh-tokoh gerakan lainnya, Aliarcham ditahan beberapa kali karena propaganda anti-kolonialnya. Ia meninggal dalam pengasingan di Boven Digoel, Papua pada 1 Juli 1933 ("Aliarcham", 1964). Seperti Aliarcham, Tan Malaka juga bergerak dalam bidang pendidikan di mana ia ditugasi oleh SI untuk mendirikan Sekolah(-Sekolah) Rakyat pada tahun 1921. Pada tahun yang sama, ia menjadi pengurus di Serikat Pegawai Percetakan dan Serikat Pegawai Pelikan (Minyak) Hindia (Jarvis, 1967, hal. 42). Tan Malaka terutama terkenal karena karyanya *Naar de Republiek Indonesia* (Menuju Republik Indonesia) dan disebut sebagai Bapak Republik Indonesia (Sulistiyawan & Galih, 2022). Ia menjabat sebagai perwakilan Komintern untuk Asia Timur, kemudian Asia Tenggara, pada tahun 1923 (Putra, 2018, hal. 103-104; Jarvis, 1967, hal. 44-45).

Radikalisme politik progresif di Indonesia mengalami pasang surut. Setelah pemberontakan tahun 1926-1927 yang gagal, gerakan politik radikal mengalami kemunduran. Pasca kemerdekaan, gerakan ini berkembang kembali melalui partai yang sama hanya untuk kemudian dihancurkan oleh bangkitnya kekuasaan Orde Baru, tetapi seperti menolak mati, mulai bertumbuh kembali

menjelang peristiwa gerakan Reformasi dan seterusnya baik dari tradisi anarkis (Nugroho, 2020) maupun (neo-)Marxian (Pontoh, 2020).

Bima Satria Putra (2018) dari Penerbit Pustaka Catut menyebut gerakan anarkis “generasi kedua” ini aktif dalam diskusi, percetakan *zine*, dan penampilan musik yang mempromosikan gagasan anarkisme dan anti-otoritarianisme. Mereka berperan dalam terbentuknya Jaringan Anti-Otoritarian (JAO) pada tahun 2007 sebagai sebuah *show-off project* untuk menarik perhatian kelompok gerakan anti-otoritarian (hal. 215-219). Sementara tradisi Marxian sebagai pemikiran dapat berkembang, tetapi sebagai gerakan mengalami tantangan dalam membangun organisasi politik (lihat Ariane, 2015; Setyawan, 2019).

Dalam masyarakat kontemporer, radikalisme politik kaum muda tampak dalam gerakan-gerakan protes yang menuntut perubahan sosial-politik. Kaum muda di berbagai negeri merasa kondisi sosial-politik hari ini telah menyengsarakan hidup mereka dan menyadari mereka tidak memiliki kendali atas kehidupan mereka. Protes-protes yang dilakukan kaum muda sering membawa gagasan demokrasi langsung yang menunjukkan tentangannya terhadap demokrasi perwakilan yang dipandang tidak lagi mewakili diri mereka (Muxel, 2020, hal. 123; Yorulmaz, 2018a).

Peristiwa protes terhadap sejumlah undang-undang kontroversial, khususnya UU Cipta Kerja, yang terjadi pada tahun 2019 dan seterusnya menandakan radikalisasi politik kaum muda. Protes yang melibatkan pelajar dan mahasiswa ini pernah diberikan cap/label sebagai gerakan anarko-sindikalisme di

mana polisi menangkap seorang pemuda yang membuat kesaksian dirinya adalah “ketua” anarko-sindikalis (detik.com, 2020). Hal ini dipandang oleh beberapa pihak sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan hantu/musuh baru yang disandikan dengan komunisme (Yamani, 2021).

Secara umum, radikalisme politik progresif di antara kaum muda tampak dalam perubahan cara pandang atas politik yang memberontak terhadap ketetapan/norma yang digariskan oleh orang-orang tua (yang konservatif). Mereka tidak melihat solusi dalam keberlanjutan status quo dan perubahan yang moderat terkadang dipandang tidak cukup. Radikalisme mereka muncul dalam budaya perlawanan yang bercirikan punk rock, bendera hitam dan/atau merah, simbol A atau bintang merah, feminisme, ekologi, hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua, dsb.

### **2.3. Kehadiran Teknologi Digital dan Perannya dalam Partisipasi Politik Kaum Muda**

Salah satu karakter khusus dari kaum muda adalah terbiasakannya mereka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka mampu dan di antaranya mahir menggunakan alat-alat elektronik seperti komputer, ponsel pintar, dan media sosial. Kebanyakan kaum muda termasuk dalam generasi *digital native*. Menurut Creighton (2018), *digital native* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kelompok usia tertentu yang telah merasakan kehadiran internet sejak mereka kecil dan tumbuh dewasa. Karenanya mereka banyak menghabiskan

waktu berinteraksi dengan medium digital ini daripada medium konvensional (hal. 133). Statistik Pemuda Indonesia 2022 menyebutkan 96% kaum muda menggunakan *handphone* dalam kurun waktu tiga bulan terakhir dari waktu survei dilakukan. Hanya 22 persen kaum muda yang menggunakan komputer. Penggunaan internet dalam tiga bulan terakhir besar, yaitu sebanyak 92% (Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2022. hal. viii).

Kehadiran teknologi digital berperan positif terhadap partisipasi politik kaum muda. Ini didukung oleh penelitian-penelitian terkait. Survei yang dilakukan oleh Pew Research Center (2018) di sejumlah negara termasuk Indonesia menunjukkan bahwa kaum muda berusia 18-29 tahun aktif mengomentari isu-isu sosial atau politik secara daring dan termotivasi untuk melakukan tindakan politis terkait isu-isu seperti kebebasan berpendapat, diskriminasi, korupsi pemerintah, kualitas pendidikan, dan kualitas layanan kesehatan. Dalam penelitian *meta-analysis* dari 106 penelitian berbasis survei, Boulianne & Theocharis (2018) menemukan adanya hubungan kuat antara aktivitas daring dan partisipasi politik luring yang menandakan klaim *slacktivism* sebetulnya tidak tepat. Aktivitas daring yang bertujuan politis, seperti menulis blog, membaca berita online, dan diskusi politik online, memiliki dampak positif terhadap partisipasi politik luring, seperti menghubungi pejabat publik, berdiskusi politik, menjadi sukarelawan, dan melakukan protes.

Terdapat sejumlah contoh bagaimana kaum muda menggunakan teknologi digital untuk mendukung partisipasi politiknya. Di Inggris, teknologi digital

memainkan peran penting dalam kampanye oleh organisasi Momentum. Salah satu teknologi berbasis web yang dikembangkan oleh Momentum, My Nearest Marginal (MNM), banyak membantu memobilisasi ribuan sukarelawan dalam kampanye dari rumah ke rumah atau yang disebut *political canvassing* (MasterClass, 2021). Hasilnya signifikan karena aktivis Momentum menyebutkan pada pertengahan tahun 2017 Labour Party kehilangan 5 kursi dari Partai Konservatif tetapi berhasil merebut 28 kursi dari mereka, 6 dari Scottish National Party dan 2 dari Partai Demokrat Liberal. Alat lain yang digunakan adalah MyCampaignMap (MCM) yang telah diakses 1,4 juta kali (MNM hanya 100.000 kali pada 2017) dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan acara-acara kampanye (Clarke, 2019, para. 2-4).

Momentum dalam kampanye daringnya memproduksi video-video informasi yang dipos baik di Youtube dan Twitter. Video-videonya di Youtube yang berdurasi pendek-menengah selalu ditonton sedikitnya ratusan kali dan banyak di antaranya ribuan kali. Video-video itu menanggapi isu-isu politik dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan mereka (Momentum, n.d.-b). Salah satu yang terkenal adalah video “In Time for Christmas.” Video ini dikenal karena kekocakannya. Video ini memuat kisah fiksi yang mengkritik privatisasi layanan publik di bawah pemerintahan Konservatif. Salah satu privatisasi layanan publik, yang dikisahkan di video ini, adalah privatisasi layanan pos atau surat (Momentum, 2017).

Perhatian utama momentum berada pada media sosial Twitter. Pada 7 November 2019 Momentum merilis video yang menjelaskan kebijakan Corbyn mengenai Brexit (Momentum, 2019). Hanya beberapa jam sejak dirilis video ini telah ditonton 150.000 kali. Keberhasilan strategi digital Momentum dimungkinkan oleh tim digital Momentum yang terdiri dari kaum muda yang terbiasa dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (Proctor, 2019). Mereka memanfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pandangan-pandangan politiknya dan mengkampanyekan baik kebijakan-kebijakan progresif dan kandidat-kandidat Labour yang mereka dukung.

Di Amerika Serikat, latar belakang gerakan Occupy tidak terlepas dari penggunaan teknologi digital dan budaya internet. Panggilan untuk menduduki distrik finansial Wall Street, Manhattan ([#occupywallstreet](#)) pertama datang dari sebuah blog di situs majalah anti-konsumerisme Adbusters (Culture Jammers HQ, 2011). Gerakan ini dimobilisasi hampir sepenuhnya melalui internet. Penggunaan tanda pagar [#occupywallstreet](#) di media sosial khususnya Twitter mempopulerkan gerakan ini ke berbagai tempat. Dalam waktu sebulan, tanda pagar baru, seperti [#occupyboston](#), [#occupydenver](#), dan [#occupysd](#), bermunculan. Apa yang bermula dari sebuah tanda pagar di internet menginspirasi sebuah gerakan internasional (Berkowitz, 2011).

Dalam periode pemilihan presiden tahun 2016, penggunaan sebutan “democratic socialist” oleh kandidat presiden Bernie Sanders mengundang perhatian banyak orang. Kaum muda yang tertarik dan penasaran mulai mencari



tahu dari internet tentang “democratic socialism” di mana mereka dipertemukan dengan halaman situs jejaring Democratic Socialists of America. Peningkatan tajam keanggotaan DSA didorong pula oleh penggunaan media sosial khususnya Twitter oleh relawan-relawan DSA (Schwarz, 2017, bag. “DSA: Bernie and Beyond”). Pemanfaatan teknologi digital tampak dalam kampanye Bernie Sanders di mana para sukarelawan melakukan pertemuan daring dan koordinasi menggunakan platform Slack dan mengelola halaman-halaman dan grup-grup di Facebook (Sifry, 2016). Entusiasme akan perubahan politik yang berarti di dalam pemerintahan membuat kaum muda aktif menyuarakan dukungannya kepada Bernie Sanders.

Di Turki, demonstrasi Gezi membesar ketika berita tentang brutalitas polisi anti huru-hara terhadap para demonstran menyebar luas di media sosial yang diikuti oleh panggilan untuk mendukung para demonstran. Pada waktu itu hanya dua atau tiga stasiun televisi yang menampilkan secara detail kejadian tersebut (Herpen, 2013). Banyak kaum muda dapat ditemukan di antara para demonstran yang beragam. Protes dengan cepat meluas ke Ankara dan berbagai kota lainnya dan penggunaan #OccupyGezi di Twitter meningkat sampai 160.000 penyebutan (“Protester #OccupyGezi”, 2013)

Di Indonesia, kaum muda menggunakan teknologi digital khususnya media sosial untuk mengorganisir di antara teman-temannya agar bergabung dalam protes-protes di berbagai kota terhadap undang-undang kontroversial seperti UU Cipta Kerja. Kaum muda Milenial dan Gen Z memiliki informasi yang

baik mengenai hal-hal politik dan pengetahuan ini terutama didapat dari terpaan berita politik di *feed* media sosial. Selain untuk mengajak bergabung, media sosial dimanfaatkan untuk mengumpulkan dana bantuan dan informasi mahasiswa hilang (Hyronimus, 2019; Novak, 2021, hal. 10). Dalam gerakan-gerakan sosial secara luas, media sosial sering digunakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan isu-isu tertentu. Akun @mahasiswa\_bergerakk di Instagram, misalnya, dijalankan oleh mahasiswa dan aktif menyuarakan isu-isu sosial dan lingkungan. Akun tersebut memiliki pengikut yang jumlahnya mencapai 41 ribu orang (“Mahasiswa Bergerak”, n.d.).